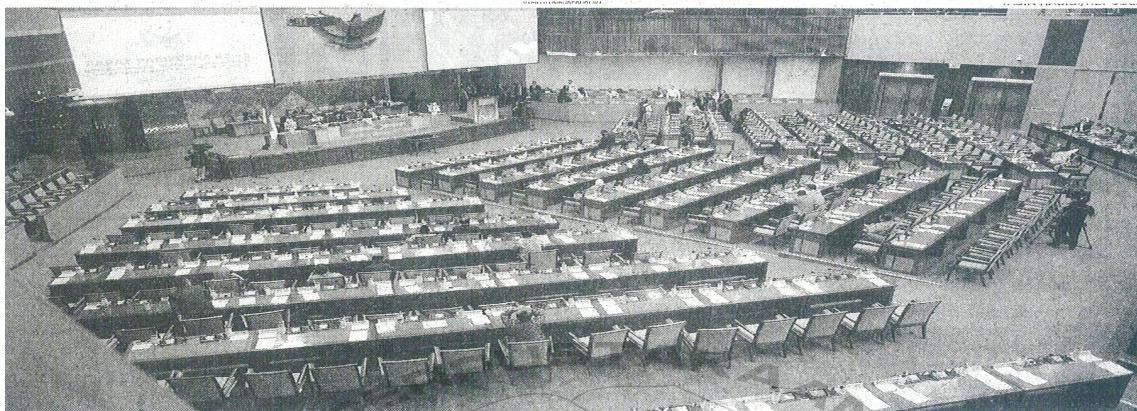




**Judul** : Menyoal kenaikan anggaran kunker  
**Tanggal** : Kamis, 14 September 2017  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 21

**REPUBLICA** KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017

## Menyoal Kenaikan Anggaran Kunker



1 Sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

**D**PR mengusulkan kenaikan anggaran kunker dewan ke luar negeri sekitar 70 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Berdasarkan usulan, anggaran kunker ke luar negeri dinaikkan dari Rp 201,7 miliar di 2017 menjadi Rp 343,676 miliar untuk 2018.

Usulan kenaikan anggaran kunker ini langsung saja mengundang polemik. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR melalui Sekretaris Fraksi Yandri Susanto meminta pengkajian ulang usulan kenaikan anggaran kunker tersebut. Menurut dia, kajian ulang diperlukan untuk menilai perlu tidaknya kenaikan anggaran kunker mencapai 70 persen itu.

Padangan lebih halus disampaikan mantan ketua DPR Agung Laksono. Menurut Agung, usulan kenaikan anggaran kunker harus disertai proses yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemilihan kunker anggota dewan juga harus dilakukan secara selektif. Dengan kata lain, Agung meminta setiap anggota dewan yang ke luar negeri harus menyampaikan ke

publik mengenai keseluruhan proses dan hasil kunker. Hal itu perlu dilakukan lantaran anggota dewan sejatinya mempunyai atasan, yakni rakyat.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pertimbangan usulan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri karena menyesuaikan kurs mata uang dolar AS. Selain itu, usulan kenaikan juga didasarkan atas upaya peningkatan kinerja dan diplomasi parlemen. Jadi, kata Taufik, adanya kenaikan anggaran bukan berarti ada perubahan dari intensitas kunker anggota dewan ke luar negeri.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, kenaikan anggaran kunker ke luar negeri tak akan diakali anggota dewan. Lagipula, anggota DPR memang perlu melakukan studi banding ke negara lain. Karena itu, dia meminta publik tidak mempermasalahkan masalah kunker DPR ke luar negeri.

Lalu, bagaimana pandangan publik mengenai isu ini? Berikut sejumlah komentar yang diterima redaksi *Republika* atas topik "Usulan Kenaikan Anggaran Kunjungan Kerja Anggota DPR ke Luar Negeri". *n ed: eh ismail*



# KLIPPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://klipping.dpr.go.id

### Jangan Aji Mumpung

Andriono Kurniawan, Guru SMA Islam NBS

Cinangka, Serang, Banten



Sudah saatnya anggota DPR kita memperbaiki citra dengan melakukan aksi "bersih" yang patut diulang. Kita sebagai anggota amalih beriman dan profesional. Proporsional dan profesional. Proporsional di sini mengandung arti bahwa agenda kunjungan kita tidak boleh melahih dalam mengungkapkan ucapan rakyat. Transparansi penggunaan dana operasional sebaiknya mutlak dibudayakan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Kita tidak boleh mengulang kini cukup memiliki amanah. Profesional berarti bahwa kunjungan tersebut benar dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan misi kunker sehingga tujuan kunker benar bertercapa. Jangan sampai fenomena nafsu yang dimiliki oleh khalayak tentang kunker kembali. Selain itu, kunker kita yang berada di luar negeri tidak ingin lagi melihat para wakil rakyat bersikap aji mumpung. Seperti mereka yang berpikir bahwa mumpung jadi anggota DPR, maka mengagendakan banyak kunjungan ke luar negeri dengan merasa berhak. Mumpung menjadi anggota DPR, maka sesekali mereka menyampaikan ucapan. Ingatlah, wohai anggota DPR bahwa tidak ada istilah "dana pemerintah" untuk setiap rupiah yang Anda gunakan, namun itu adalah "uang rakyat" yang diperuntukkan "untuk rakyat" yang diwasi penggunaannya "oleh rakyat".

### Uang Negara, Uang Rakyat

Arkan Paradise, Universitas Darussalam Gontor



Walaupun dengan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri dapat memberikan pengaruh dengan negara lain dan memperkuat substansi legislasi, tetapi banyak kasus yang terkait dengan kunker itu sendiri. Misalnya, tugas negara diselenggarakan dengan jalur-jalur atau kegiatan pribadi. Ditambah lagi dengan usulan kenaikan anggaran untuk kunker yang mencapai kurang lebih 70 persen dari anggaran total. Meskipun anggaran ini sedikit. Dengan berdasaran masalah tipe peswaf dan mahalnya biaya penginapan, keanggaran ini perlu dirundung secara matang-matang. Karena anggaran itu mengungkapkan uang negara dan uang negara berasal dari uang rakyat. Jika rupiah yang dikeluarkan untuk kunker itu benar-benar harus dilakukan secara terapan dan akhirnya dan prioritasnya harus dilakukan dengan selektif. Kegiatan kunker ini harus dipublikasikan, agar rakyat bisa mengetahui bahwa yang mereka tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena atasan pemerintah yang hakiki adalah rakyat.

### Sangat tidak Berempati

Novi Indarto, Magetan, Jawa Tengah



Di saat eksekutif menganggarkan ikat pinggang dalam rangka efisiensi anggaran negara, masyarakatnya juga kenaikan anggaran tersebut sangat tidak berempati. Zaman sudah sangat maju, stasi banding menggunakan teknologi internet kini bukan suatu hal yang aneh. Pembicaraan bisa pakai emoji. Kalau pun harus ada pembicaraan langsung, tidak perlu satu minggu. Mengapa yang ikut? Cukup anggaran kunjungan kerja sudah cukup dan tidak perlu dinaikkan. Zaman susah gini harusnya para wakil rakyat sudah tidak waktunya lagi menghambur-hamburkan uang rakyat, tapi bahu-membahu memajukan bangsa.

### Lihat Dulu Programnya

Faiq Aminuddin, Tedungan, Wedung, Demak



Perjalanan dan kegiatan ke luar negeri tentu membutuhkan anggaran yang besar. Fasilitas transportasi dan penginapan semakin canggih tentu berdampak pada kenaikan harga. Dan sudah sewajarnya bila anggaran tahun lebih besar dari anggaran tahun lalu. Tetapi, mengapa nilai uang dan kenaikan harga yang tidak wajar adalah bila ada program yang diragukan

manfaatnya, tidak dihentikan, kok malah ditingkatkan. Jadi, di luar dogramnya.

### Efesiensi Anggaran

Aji Setiawan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Jakarta



Usulan kenaikan anggaran kerja anggota DPR menuai polemik. Bagaimana tidak? Selama ini, DPR dipandang sebagai lembaga yang belum menunjukkan indeks kepuasan publik. DPR belum merepresentasi rakyat dengan baik. Hal tersebut mengindikasikan banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Penambahan anggaran kerja tanpa dilengkapi peningkatan kinerja hanya akan membuat citra DPR semakin buruk. Dengan begitu, alasan yang mereka miliki kita harus menanyakan seberapa efektif dan efesiensi anggaran tersebut digunakan. Jangan sampai yang besar tersebut digunakan untuk *pleasanter* ke luar negeri.

Setiap anggota dewan yang hormat, sudah seharusnya melakukan kinerja dengan maksimal. Prioritaskan pendanaan untuk menyeraf aspirasi masyarakat, terjun langsung ke daerah, berdialog untuk mendengar keluhan dan permasalahan rakyat. Dengan begitu, diharapkan anggota DPR dapat menjadi pionir perubahan pada ketela kehidupan bermasyarakat. Harapan kita, DPR menjadi lembaga yang efisien menggunakan anggaran.

### Kunciannya Hasil Kunjungan

Ridholoh Ismat, Mahasiswa Doktoral (S3) Pascasarjana

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta



Hampir tidak mungkin menjalankan sebuah mesin transportasi besar tanpa bahan bakar yang juga memerlukan biaya besar pula. Seperti transportasi pesawat misalnya, tanpa bahan bakar avtur yang saat ini mencapai Rp 1,3 miliar per liter, tentu saja tidak mungkin generasian. Demikian halnya dalam dunia pendidikan. Mustahil melaksanakan pendidikan yang bermutu jika tanpa melalui proses administrasi yang lengkap dan mutu.

Keterlakuan pengembangan dan pendidikan yang masuk dalam kategori sarana dan prasarana ini tentunya momakan biaya yang tidak sedikit, sekali pun sekolah tersebut bertarif "gratis". Sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah tidak berarti sekolah tersebut tidak membutuhkan biaya besar. *Hanya saja*, sekolah itu dianggarkan di leher pemerintah bukan para orang tua siswa.

Nampaknya, dua contoh di atas dapat direalisasikan dalam dunia pemerintahan. Jika ingin adanya perubahan berarti untuk negara, rasanya wajar jika harus menguras biaya yang besar.

Namun, tetap harus realistik dan terbuka. Di sisi lain, kita harus percaya kepada wakil rakyat bahwa mereka adalah orang terpilih yang profesional menjalankan tugas kenergosaan. Berita yang beredar selama ini tentang ketidaksesuaian anggota DPR dalam melaksanakan kunjungan kerja luar negeri bisa diataskan dengan hasil kunjungan berupa kuesioner yang bisa dibuktikan oleh para ahli.

Selain itu, di zaman yang serba keterbukaan ini, sudah patut bila hasil kunjungan tersebut dipublikasikan poin pentingnya agar stigma negatif yang selama ini menempati pada anggota DPR yang melakukan kunjungan ke luar negeri untuk hura-hura segera terbantahkan.

### Utamakan Tugas yang Primer

Maulida 'Izzatu Amin, Mahasiswa Ajidah Fitats Islam,

Unida Gontor



Layaknya seorang produsen barang dagang, semakin berkualitas barang yang ia hasilkan, maka semakin tinggi pula harga barangnya. Begitupula dengan negara. Tetapi, apa jadinya jika barang yang dijual penuh dengan cacat dan kekurangan di sana-sini, sedangkan harga yang ditawarkan setelahnya jauh lebih mahal? Pastilah akhirnya kirkir barang tersebut tidak diinginkan oleh konsumen. Dalam kasus pengajuan penambahan anggaran kunjungan luar negeri oleh DPR ini, rasa juga memberikan tanda bahwa anggaran yang diminta tidak relevan.

Dengan hasil evaluasi kita sebelumnya, banyaknya

kunjungan luar negeri justru mengarah pada terbengkalainya

tugas-tugas yang berskala primer dan priori di dalam badan DPR sendiri.

Bisa dihitung dengan jari RUU yang berhasil mereka

rampungkan menjadi UU di tahun 2016 dari target awal 50 RUU.

Seharusnya hal yang demikian tidak bisa dibenarkan. Primer penambahan anggaran sebesar 70 persen bisa disebut tidak imbang dengan produktivitas kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam ini, mental kita semua seharusnya juga terdidiuk untuk tidak berjasa kerdi dengan meminta lebih sebanyak sejuta yang belum diberikan.

Bahkan, seharusnya ada sedikitnya dana, tak menghalangi semangat loyalitas dan totalitas dalam berdedikasi. Setiap pengabdian kepada negara seharusnya tidak terpaku pada nominal materi. Sebagaimana, ia dilandasi dengan semangat yang perjuangan.

### Evaluasi Hasil Kinerja Tahun Lalu

Ahmat Rondi Toyib, Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Al Hikmah Surabaya



Pemerintah perlu mengajui ulang tentang usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri yang mencapai 70 persen dari RAPBN tahun lalu. Apakah anggaran dana ini memang digunakan untuk kunjungan kerja murni atau ada yang bersifat pribadi? Selain itu, pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu hasil kinerja DPR tahun-tahun sebelumnya. Kemudian

pemerintah baru memutuskan anggaran dana yang diusulkan DPR tersebut. Ini adalah strategi itu yang seharusnya dilakukan pemerintah.

Jika tidak, "dikhawatirkannya" anggaran akan digunakan untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Jika kenaikan dana setiap tahun tidak mencakupkan hasil kinerja, perbaikan harus dilakukan dan memerlukan anggaran tambahan yang memang diperlukan saja. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar jeli dan sangat teliti agar peluang korupsi oleh badan-badan pemerintah tidak terjadi dengan dana berlebih yang diusulkan.

### Perlu Dikaji Ulang

Soritah Ahmad Ramdani Harahap, Mahasiswa Ekonomi Islam,

Unida Gontor



DPR sebagai lembaga legislatif yang diwajibkan sebagai representasi masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pada akhir akhir ini, DPR melalui Badan Urusan Rantau mengajukan usulan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri menjadi Rp 343,5 miliar untuk 2018. Anggaran ini naik Rp 141,8 miliar dan 2017, yang berarti Rp 201,7 miliar. DPR menyalusilkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri naik pada RAPBN 2018.

Usulan ini sepihak kurang tepat ditengah lemahnya ekonomi dinegara kita. Seharusnya penggunaan anggaran dipakai untuk menyeraf aspirasi rakyat ketimbang kunker ke luar negeri. Kita harus memprioritaskan anggaran untuk menyeraf aspirasi, bukan tanggung benturan masyarakat yang berkaitan dengan meraka.

Manfaatnya jauh lebih besar daripada kunjungan ke luar negeri. Walaupun kunker luar negeri harus tetap dilaksanakan, akan tetapi harus dibatasi dan benar-benar membawa hasil yang baik untuk bangsa dan Indonesia.

### Tolak Usulan

Diko Ahmad Riza Primadi, Mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Malang



Dari semua kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air, lembaga DPR merupakan salah satu lembaga negara yang anggota maupun pimpinannya banyak tersandung kasus korupsi.

Telah banyak korupsi itu banyak merugikan negara, bahkan hingga triliunan rupiah. Usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR yang yang akhirnya ini diidengarkan perurupan hal yang harus disikapi pemerintah dengan tegas.

Menolak usulan kenaikan anggaran adalah jalan yang tepat dan benar. Pemerintah perlu menolak usulan anggaran kunjungan kerja anggota DPR yang yang akhirnya ini diidengarkan perurupan hal yang harus disikapi pemerintah dengan tegas.